

**DAMPAK PANDEMI *COVID-19* PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA UNTUK WARGA MISKIN
(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**HELEN PRANIKA
NIM.07011281722089**

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Juli 2021**

**DAMPAK PANDEMI *COVID-19* PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA UNTUK WARGA MISKIN
(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**HELEN PRANIKA
NIM.07011281722089**

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Juli 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DAMPAK PANDEMI *COVID-19* PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA UNTUK WARGA MISKIN
(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Oleh :

**HELEN PRANIKA
07011281722089**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021

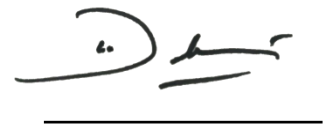
Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001**



Pembimbing II

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA UNTUK WARGA MISKIN
(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim
Penguji Pada tanggal 14 Juli 2021 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

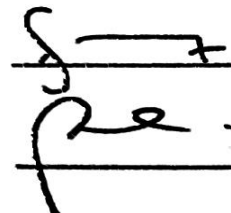

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
Ketua

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
Anggota

Drs. Gatot Budiarto, MS
Anggota

Junaidi, S.IP., M.Si
Anggota



Indralaya, Juli 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196310021992032001

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”

(Q.S Ali Imran, ayat 173)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, ayat 5)

“Tentang prasangka baik yang selama ini sudah diikhtirakan, maka kemudian inilah waktu yang tepat menurut Allah untuk melanjutkan perjuangan diri, Allah sebaik-baik perencana bagi setiap hambanya”

(Helen Pranika)

Bismillahirrahmanirrahim,

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

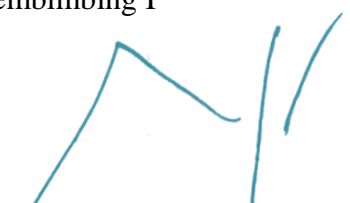
1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
2. Kedua Orang tuaku tersayang
3. Keluarga Besarku
4. Sahabat-sahabatku
5. Teman seperjuangan (Administrasi Publik 2017)
6. Almamater kebanggaan (Universitas Sriwijaya)
7. Organisasi perjuanganku KAMMI Al-Aqsho Unsri
8. Organisasi perjuanganku LDF WAKI FISIP Unsri

ABSTRAK


Penelitian ini membahas tentang dampak Pandemi *Covid-19* pada perubahan anggaran program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pandemi yang berdampak pada perubahan anggaran program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumsel pada tanggal 11 Juni 2020 Nomor 900/1425/BPKAD-11/2020 perihal penjadwalan ulang APBD Tahun Anggaran 2020. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori dari Nordiawan dan Hertianti terkait anggaran sektor publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Peningkatan Kesempatan Kerja untuk warga miskin belum sesuai dengan target yang direncanakan dalam rencana strategis Disnakertrans Provinsi Sumsel, dimana pada masa Pandemi *Covid-19* ini hanya ada satu kegiatan yang dilaksanakan sehingga berdampak pada jumlah target penerima manfaat bantuan. Ketidaksiharian ini menunjukkan bahwa terjadinya Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran sehingga ini berdampak pada pelaksanaan program serta tujuan dari hasil yang ingin dicapai sebelumnya. Saran yang menjadi rekomendasi masukan pada penelitian ini adalah pentingnya dalam menyusun skala prioritas untuk alokasi anggaran kegiatan dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kata kunci: Dampak Pandemi *Covid-19*, Perubahan Anggaran

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II


Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Juli 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,



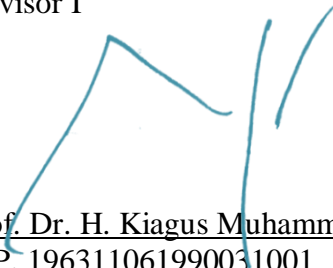
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by the covid-19 pandemic which had an impact on changes to the work opportunity improvement program for the poor citizens according to the circular letter of the Governor of South Sumatra on June 11, 2020 Number 900/1425/BPKAD-11/2020 regarding the rescheduling of the APBD for Fiscal Year 2020. This type of research is descriptive using qualitative methods. The types and sources of data used are primary data and secondary data, while data collection techniques are carried out through documentation and interviews. This study uses the theory of Nordiawan and Hertianti related to the public sector budget. The results of this study indicate that the implementation of the Employment Opportunity Improvement program for the poor has not been by accordance with the targets planned in the strategic plan of the South Sumatra Province Manpower and Transmigration Office, where during the Covid-19 Pandemic there was only one activity carried out so that it had an impact on the number of target beneficiaries of assistance. This discrepancy shows that the occurrence of the Covid-19 Pandemic caused a change in the budget so that this had an impact on the implementation of the program as well the objectives of the results to be achieved previously. Suggestions that become recommendations for input in this research are the importance of developing a priority scale for budget allocation for activities in maximizing program implementation and monitoring and evaluating the achievement of the results of activities that have been carried out to achieve the desired goals.

Keywords: Impact of the Covid-19 Pandemic, Budget Changes

Advisor I



Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, July 2021
Head of Public Administration Departement
Faculty Of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak henti-hentinya saya panjatkan rasa syukur karena rahmatnyalah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Perubahan Anggaran Program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh derajat pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang terlibat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, dorongan, bimbingan, ilmu dan nasihat yang selalu hadir membersamai proses pembuatan skripsi ini sangat menguatkan saya dalam menjalani setiap langkahnya, jika ada kata yang lebih indah dari terima kasih maka kata itulah yang ingin saya ungkapkan, kepada:

- a. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah membuat penulisan skripsi ini berjalan lancar.
- b. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Efendi dan Ibu Mastuti yang telah memberikan Do’a dan semua bentuk dukungan selama ini dan menjadi penyemangatku setiap harinya.
- c. Keluargaku tersayang, kakakku Teni Febrika dan Weni Sartika, adikku Valeno Melki Hermendo beserta keponakanku Gava, Gio, Taqi dan Gea dan semua keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung dan memberikan motivasi.
- d. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Ir. H., Anis Sagaff, MSCE.
- e. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
- f. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si periode 2018-2023.
- g. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. dan Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si yang telah memberikan bimbingan dan banyak membantu dalam penulisan skripsi.
- h. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
- i. Semua Bapak/Ibu Dosen yang Mengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik beserta Staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang terlibat dari awal sampai akhir dalam perkuliahan ini.
- j. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Bapak Drs. H. Koimudin, S.H., MM beserta staf Tata Usaha (TU) yang telah memberikan izin penelitian.

- k. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Bapak Andi Bobby W, S.H., M.Si, Kasi Sertifikasi dan Produktivitas Ibu Dra. Kesti Arina beserta semua Staf yang telah membantu dan memberikan semua data terkait penelitian skripsi.
- l. Sahabatku, Teman seperjuangan Administrasi Publik 2017 yang sering direpotkan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan dunia perskripsian ini.
- m. Semua pihak yang telah membantu baik lewat Do'a maupun perbuatan sehingga skripsi ini selesai.

Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan serta saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang selalu memberikan kemudahan pada kita semua dalam segala hal. Saya ucapkan terima kasih.

Penulis



Helen Pranika

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. Keuangan Negara sebagai bagian dari Administrasi Negara	11
2. Teori Anggaran Sektor Publik	13
3. Teori Kemiskinan.....	16
B. Teori yang digunakan	18
C. Penelitian Terdahulu	18
D. Kerangka Pemikiran.....	22
1. Rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas diri organisasi dalam pelayanan.....	25
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.....	25
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.....	26
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Definisi Konsep	28
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
1. Data Primer	32
2. Data Sekunder.....	32
E. Informan Peneliti	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Dokumentasi	33
2. Wawancara.....	34

G. Teknik Pemeriksaan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	35
1. Sejarah Singkat Pembentukan Disnakertrans Provinsi Sumsel	35
2. Visi dan Misi Disnakertrans Provinsi Sumsel	36
3. Ketentuan Umum dan Kedudukan Disnakertrans Provinsi Sumsel.....	38
4. Struktur Organisasi Disnakertrans Provinsi Sumsel	39
5. Komposisi SDM Disnakertrans Provinsi Sumsel	40
B. Pembahasan	43
Dampak Pandemi Covid-19 Pada Perubahan Anggaran Program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin.....	43

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Prov. Sumsel TA 2020	7
Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Prov. Sumsel TA 2020	8
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4. Fokus Penelitian	31
Tabel 5. Komposisi Pegawai Disnakertrans Berdasarkan Golongan	40
Tabel 6. Komposisi Pegawai Disnakertrans Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 7. Komposisi Pegawai Disnakertrans Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
Tabel 8. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumsel	46
Tabel 9. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2020 Disnakertrans Provinsi Sumsel	51
Tabel 10. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Prov. Sumsel TA 2020.....	56
Tabel 11. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Prov. Sumsel TA 2020.....	57
Tabel 12. Matrik Temuan Peneliti Secara Keseluruhan	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tren Persentase Kemiskinan Sumsel dan Nasional September 2009-2019	4
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2019 Provinsi Sumsel	5
Gambar 3. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian.....	27
Gambar 4. Struktur Organisasi Disnakertrans Provinsi Sumsel.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Pembimbing II
7. Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
8. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
9. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
10. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji I
11. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji II
12. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
13. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
14. Pedoman Wawancara
15. Dokumentasi Foto Wawancara
16. Surat Edaran Gubernur Sumsel Tentang Perubahan Anggaran
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020

DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
2. BPS : Badan Pusat Statistik
3. Covid-19 : *Corona Virus Disease*
4. Disnakertrans : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
6. PENTA : Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
7. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
8. Perppu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
9. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
10. Renstra : Rencana Strategis
11. Sumsel : Sumatera Selatan
12. TKM : Tenaga Kerja Mandiri
13. TTG : Teknologi Tepat Guna

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, letak geografis seperti ini akan berpengaruh terhadap sistem pemerintahannya yang memerlukan peraturan sebagai suatu hal yang mendasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan makmur. Pemerintahan seperti ini merupakan rintangan tersendiri bagi setiap daerah untuk dapat saling berkoordinasi antar daerah satu dan daerah lainnya. Letak geografis kepulauan ini mendorong pemerintahan dalam melakukan cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional secara menyeluruh, maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibawah pengawasan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah pusat dalam mengatur jalannya pemerintahan serta memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing.

Kebijakan otonomi daerah tersebut harus sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di pelosok negeri serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerah secara mandiri dan terarah. Menurut Todaro (2006) pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara multidimensional yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, namun tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta

pengentasan kemiskinan. Penyelenggaraan pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan untuk masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 diatur tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah ke arah perbaikan ekonomi serta penyaluran pendapatan tepat sasaran sehingga tercapai ekonomi yang stabil dan terarah untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Melihat keadaan yang menimpa dunia belakangan ini tepatnya dimulai pada akhir tahun 2019, telah diketahui adanya penyakit baru bernama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan pandemi global atas *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 11 Maret 2020. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 2 Maret 2020 nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus Covid-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus Covid-19 dari Wuhan itu telah menjangkiti dua warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Secara global hingga saat ini pada tanggal 11 Januari 2021 penyebaran virus Covid-19 sudah terkonfirmasi lebih dari 223 negara dan wilayah di seluruh dunia, terkonfirmasi yang positif Covid-19 berjumlah lebih dari 89.048.345 orang, sedangkan yang meninggal dunia berjumlah lebih dari 1.930.265 orang.

Di Indonesia, data resmi pemerintah menunjukkan sebaran kasus positif sampai dengan 11 Januari 2021 terkonfirmasi ada lebih dari 828.026 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19, ini menyebabkan kasus orang meninggal per harinya meningkat, per tanggal 11 Januari 2021 lebih dari 24.129 kasus orang meninggal dan lebih dari 6.81.024

orang sembuh, kemudian virus ini tersebar di lebih dari 510 Kabupaten/kota serta di 308 Transmisi lokal. Selain kesehatan masyarakat, adapun aspek yang sangat berpengaruh yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 adalah masalah mengenai keuangan negara. Akibatnya, sumber keuangan negara untuk membiayai berbagai macam stimulus dalam hal ini untuk menangani pandemi Covid-19 terus tertekan di tengah-tengah pemasukan negara yang semakin menurun. Pemerintahan menyadari bahwa dampak dari pandemi Covid-19 akan sangat berbahaya untuk kedepannya sehingga kewaspadaan dalam menetapkan suatu kebijakan serta dalam hal pengelolaan Keuangan Negara harus dilakukan semaksimal mungkin.

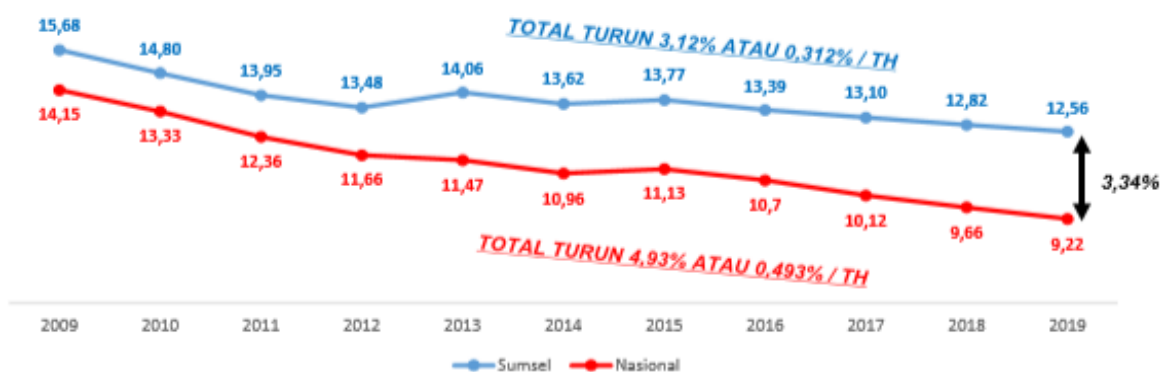
Kebijakan *extraordinary* kemudian dilakukan oleh pemerintahan untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus Covid-19 di Indonesia melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan pada bulan April 2020 lalu. Virus Covid-19 sangat berdampak tidak hanya dalam kesehatan tetapi pada perekonomian Indonesia. Selanjutnya dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintahan telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yakni, PMK-23/2020 dan PMK-28/2020 yang mengatur mengenai insentif kebijakan fiskal dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi ini dimana terjadi peningkatan jumlah data kemiskinan setiap harinya. Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini di Indonesia jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan sekitar 9,78% meningkat 0,56% point terhadap september 2019 dan meningkat 0,37% terhadap maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia kian hari kian bertambah jumlahnya, sehingga perlunya perhatian khusus dari pemerintahan dalam hal ini untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di

Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengakui Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia hampir di seluruh sendi kehidupan, baik dalam aspek pendidikan yang mengharuskan belajar secara daring di rumah masing-masing, ekonomi yang semakin melemah, sosial masyarakat yang mendapat tekanan untuk melanjutkan hidup dalam masa yang sulit karena adanya pandemi Covid-19 ini dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

Angka kemiskinan pada tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berada pada angka 12,56%. Angka kemiskinan ini berada di atas angka Nasional yakni 9,8%. Jika dengan estimasi jumlah penduduk Sumsel saat ini berada pada kisaran delapan jutaan, maka dapat diperkirakan penduduk Sumsel yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sekitar satu juta jiwa. Masyarakat miskin yang berada di Sumsel perlu secepatnya ditangani oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumsel itu sendiri. Berikut penjelasan tentang kondisi kemiskinan di Provinsi Sumsel dari tahun 2009-2019:

Gambar 1. Tren Persentase Kemiskinan Sumsel dan Nasional September 2009-2019

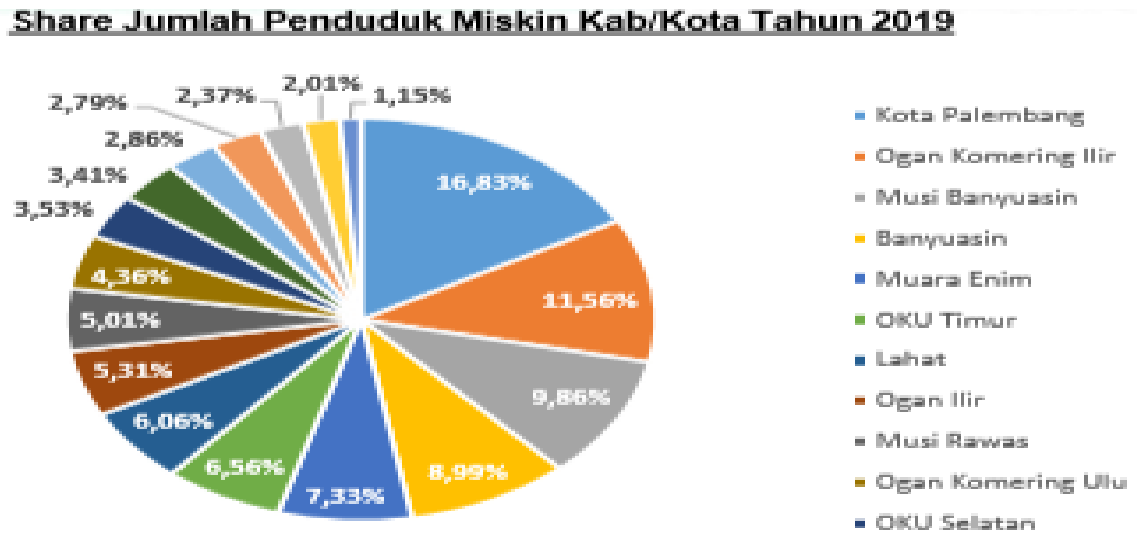


Sumber: Badan Pusat Statistik, dikutip dari buku Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Gambar di atas menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Sumsel setiap tahunnya menurun (15,68% September 2009 – 12,56% September 2019), namun lajunya lambat. Selama periode 2009-2019, sebesar 62.840 penduduk miskin Sumsel telah keluar dari

Garis Kemiskinan atau 6.284 per tahun. Secara persentase kemiskinan Sumsel di pedesaan (12,93%) lebih tinggi dari Perkotaan (11,94%). Pola ini sama dengan Nasional.

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota tahun 2019 Provinsi Sumsel



Sumber: Badan Pusat Statistik, dikutip dari buku Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Gambar di atas menjelaskan tentang jumlah penduduk miskin Kab/Kota yang ada di Sumsel pada tahun 2019 diantaranya, Kota Palembang (16,83%), Ogan Komering Ilir (11,56%), Musi Banyuasin (9,86%), Banyuasin (8,99%), Muara Enim (7,33%), OKU Timur (6,56%), Lahat (6,06%), Ogan Ilir (5,31%), Musi Rawas (5,01%), Ogan Komering Ulu (4,36%), OKU Selatan (3,53%). Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kab/Kota di Sumsel pada tahun 2019 tidak merata dan berbeda di setiap daerahnya, tentu saja ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan dalam pembangunan Provinsi Sumsel kedepannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel. Salah satu alternatif upaya dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan adalah menciptakan masyarakat miskin yang mampu dan terampil secara mandiri dalam berwirausaha. Tujuannya adalah untuk menambah pendapatan mereka sehari-hari melalui usaha yang dilakukan agar dapat

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Disnakertrans Provinsi Sumsel berkompeten sekali untuk melaksanakan kegiatan ini karena disamping dapat menggentaskan masyarakat dari kemiskinan juga dapat menciptakan dan memperluas kesempatan kerja/lapangan usaha untuk mengurangi pengangguran melalui pembentukan wirausaha baru yang ada. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin adalah program yang dirancang agar dapat di realisasikan melalui tiga kegiatan berikut ini:

1. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan untuk pembuatan Batu Bata *Conblock* di tiga kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel, targetnya untuk 90 orang.
2. Pemberdayaan Wirausaha Baru, kegiatan ini berupa bantuan usaha dari pemerintah untuk masyarakat berupa gerobak dan alat untuk membuat pisang molen dan gorengan di kota Palembang, targetnya untuk 50 orang.
3. Tenaga Kerja Mandiri, kegiatannya berupa pembuatan kripik pisang pada daerah yang sumber daya alamnya berpotensi dalam penghasilan kripik pisang yang berkualitas, lokasinya berada di kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), ditargetkan untuk 40 orang.

Berkaitan dengan permasalahan mengenai kemiskinan karena dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia, maka ini di sertai juga dengan adanya kebijakan Nasional pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19. Disamping juga Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi

ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional. Maka dalam hal ini mengakibatkan terjadinya *refocussing* anggaran pada setiap program yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel khususnya pada Program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin. Berikut ini merupakan data sebelum dan sesudah terjadinya perubahan anggaran pada dua dari tiga kegiatan yang ada di program tersebut:

Tabel 1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2020

Kode Prog/Keg	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	
18	5	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, OKU Timur	90 Orang	660.000.000,00
	6	Pemberdayaan Wirausaha Baru	Kota Palembang	50 Orang	276.017.900,00
	7	Tenaga Kerja Mandiri	Kab. Muratara	40 Orang	200.000.000,00
	Jumlah Keseluruhan			55%	1.136.017.900,00

Sumber: Formulir DPPA SKPD 2.2, data dikelola oleh penulis

Tabel di atas menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020, dimana disebutkan bahwa ada tiga kegiatan dari program Peningkatan dan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin atau disana di beri keterangan dengan kode program 18 dan kode kegiatan 5, 6, dan 7. Uraian kegiatan kode 5 yakni, Perluasan Kesempatan Kerja melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berlokasi di Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, dan OKU Timur dengan target kinerja 90 orang dan jumlah estimasi dana berjumlah Rp 660.000.000,00. Uraian kegiatan kode 6 yakni Pemberdayaan Wirausaha Baru berlokasi di Kota Palembang dengan target kinerja 50 orang dan jumlah estimasi dana berjumlah Rp276.017.900,00. Uraian kegiatan kode 7 yakni Tenaga Kerja Mandiri (TKM) berlokasi di kab. Muratara dengan target 40 orang dan jumlah estimasi dana berjumlah Rp 200.000.000,00. Ini merupakan

rencana awal program dan kegiatan beserta penetapan jumlah anggarannya sebelum terjadinya perubahan anggaran program kegiatan.

Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2020

Kode Prog/ Keg	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Plafon Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
18	5	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komerin g Ilir, OKU Timur	-	660.000.000,00	-
	6	Pemberdayaan Wirausaha Baru	Kota Palembang	50 Orang	276.017.900,00	276.017.900,00
	7	Tenaga Kerja Mandiri	Kab. Muratara	-	200.000.000,00	-
Jumlah Keseluruhan					1.136.017.900,00	276.017.900,00

Sumber: Formulir RKPD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2020, data dikelola oleh penulis

Tabel di atas menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa ada tiga kegiatan dari program Peningkatan dan Kesempatan Kerja untuk Warga Miskin atau disana di beri keterangan dengan kode program 18 dan kode kegiatan 5, 6, dan 7. Sama seperti uraian di atas, namun di sini terjadi perubahan pada dua kegiatan yang ada yakni, kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berlokasikan di Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komerin Ilir, dan OKU Timur dengan target kinerja 0 orang dan jumlah flapon anggran sebelum berubah Rp 660.000.000,00. setelah berubah berjumlah Rp 0, selanjutnya kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) berlokasikan di kab. Muratara dengan target 0 orang dan jumlah flapon anggaran berjumlah 200.000.000,00. setelah berubah menjadi Rp 0. Kini tersisa satu kegiatan yakni, Pemberdayaan Wirausaha Baru

berlokasikan di Kota Palembang dengan target kinerja 50 orang dan jumlah flapon anggaran sebelum berubah berjumlah Rp 276.017.900,00. setelah berubah menjadi Rp 276.017.900,00.

Perubahan ini berdasarkan pada pertimbangan menyangkut aturan yang berlaku yang telah di jelaskan di atas tersebut. Bukan tanpa alasan kegiatan TTG dan TKM ditunda pelaksanaannya akibat diterapkannya *refocusing* anggaran terhadap kegiatan yang tidak mendesak, agar segera dialihkan ke penanganan Covid-19. *Refocusing* anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 pada pemerintah Provinsi Sumsel akan digunakan atau di re alokasikan untuk bidang kesehatan, penanggulangan bencana bukan alam dan pemulihan ekonomi.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yakni “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Perubahan Anggaran Program Peningkatan Kesempatan Kerja untuk Warga Miskin (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan)” sehingga dapat dibahas dan ditindaklanjuti penulis serta bekerjasama dengan Badan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PENTA) selaku bidang yang memegang program tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Dampak dari Pandemi Covid-19 dalam hal ini Pada Perubahan Anggaran Program Peningkatan Kesempatan Kerja untuk Warga Miskin di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Dampak dari Pandemi Covid-19 Pada Perubahan Anggaran Program Peningkatan Kesempatan Kerja untuk Warga Miskin di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran berupa karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan dalam mempelajari dampak Pandemi Covid-19 Pada Perubahan Anggaran Program Peningkatan Kesempatan Kerja untuk Warga Miskin di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan untuk memaksimalkan anggaran yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan serta perluasan lapangan kerja untuk warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya konsentrasi Keuangan Publik.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi dan masukan terkait dengan masalah perubahan anggaran yang dapat terjadi di setiap program kerja yang akan dilaksanakan disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19, dan menjadi masukan untuk mengambil keputusan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus, Sjafari. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Departemen Tenaga Kerja RI. 2004. *Program Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)*. Jakarta Selatan: Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kerja

Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hariadi, Pramono dkk. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kemenker. 2014. *Pedoman Umum Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna*. Jakarta Selatan: Ditjen Binapenta

Kemnaker. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Tenaga Kerja Muda (Qickwins)*. Jakarta: Kemnaker

Noerdiawan, dan Hertianti. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam teori dan praktik edisi keenam*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

Todoro, Michael dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan*. Jakarta: Erlangga

Jurnal:

Bahtiar, Rais Agil dan Hariyadi. (2020). *Tekanan Anggaran Negara Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, ISSN 2088-2351

Juliani, Henny. (2020). *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 3, ISSN. 2621–2781

Ulya, Husna Ni'matul. (2020). *Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan*. el Barka: Journal of Islamic Economic and Business, Vol. 3, 80-109

Dokumen:

Data Realokasi Anggaran Belanja Langsung Disnakertrans Tahun 2020

Data WUB Tahun 2020

Formulir DPPA SKPD 2.2 Tahun Anggaran 2020

Formulir RKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020

Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Sumsel Tahun 2019-2023

Website:

covid19.go.id

disnakertrans.sumselprov.go.id

www.bps.go.id

www.kemenkeu.go.id

www.kemenkes.go.id